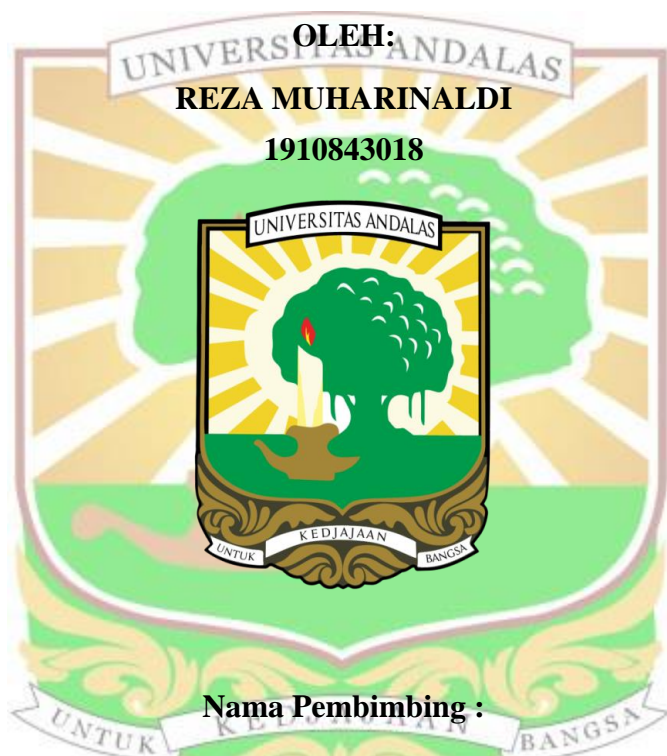


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PEMERINTAH KOTA PADANG DI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



- Nama Pembimbing :**
- 1. Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc**
  - 2. Dr. Ria Ariany, M.Si**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**

## ABSTRAK

**Muharinaldi, Reza, 1910843018, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat Tahun 2022. Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2024. Dibimbing oleh : Hendri Koeswara, SIP, M.Soc,Sc dan Malse Yulivestra, S.Sos, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 140 halaman dengan referensi 2 buku teori, 4 buku metode, 17 jurnal, 7 peraturan walikota, 1 perundang undangan, 2 website.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurang optimalnya penerapan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan kota Padang karna terdapat beberapa kendala dalam pengimplementasiannya yaitu, pada tahun 2020, Kota Padang mengalami kemerosotan dalam pelaksanaan KIP dengan predikat tidak informatif dengan perolehan nilai 35. tahun 2021, KIP di Kota Padang mengalami kenaikan kembali dengan perolehan nilai 43,36 tetapi dalam predikat kurang informatif. Selain itu, menurunnya capaian Kota Padang dalam keterbukaan informasi publik dibuktikan dengan belum maksimal dalam pengintegrasian data dan informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Padang

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan triangulasi sumber data. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri 6 variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang belum tercapai dengan baik sesuai dengan standar dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini terjadi karena implementor belum memenuhi kriteria standar yang ada sehingga tujuan kebijakan belum dapat tercapai. Lalu pada sektor sumberdaya manusia, finansial dan sumberdaya sarana dan prasarana yang belum memadai karena adanya tumpang tindih pada tupoksi. Selain itu juga disebabkan oleh hubungan antar organisasi yang belum berjalan dengan baik dan lancar serta lemahnya dukungan dari kondisi sosial, ekonomi dan politik terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Akan tetapi pada variabel kelembagaan sudah cukup baik dimana terdapat struktur organisasi yang memiliki rentang kendali yang tidak terlalu panjang sehingga memudahkan dalam koordinasi serta respon implementor yang mendukung adanya kebijakan ini.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Padang**

## ABSTRACT

**Muharinaldi, Reza, 1910843018, Implementation of Public Information Openness Policy in the Padang City Government in West Sumatra in 2022. Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2024. Supervised by: Hendri Koeswara, SIP, M.Soc ,Sc and Malse Yulivestra, S.Sos, M.Si. This thesis consists of 140 pages with references to 2 theory books, 4 method books, 17 journals, 7 mayoral regulations, 1 statutory law, 2 websites.**

This research is motivated by the problem of the less than optimal implementation of public information disclosure in the Padang city government because there are several obstacles in its implementation, namely, in 2020, Padang City experienced a decline in the implementation of KIP with a predicate of not being informative with a score of 35. In 2021, KIP in Padang City increased again with a score of 43.36 but in the predicate of less informative. In addition, the decline in Padang City's achievements in public information disclosure is evidenced by the less than optimal integration of data and information carried out by the Padang City PPID

This research uses a qualitative approach. data collection techniques using interviews, observation and documentation. The selection of informants was carried out using a purposive sampling method, with triangulation of data sources. This research uses Van Meter and Van Horn's theory which consists of 6 variables, namely policy standards and objectives, resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents, disposition of implementers, and social, economic and political environmental conditions.

The results of the research show that the performance of implementing the public information openness policy in Padang City has not been achieved well in accordance with the standards and targets to be achieved. This happens because the implementor has not met the existing standard criteria so that the policy objectives cannot be achieved. Then in the human resources, financial and infrastructure sectors, facilities and infrastructure are inadequate due to overlapping main tasks and functions. Apart from that, it is also caused by relationships between organizations that have not run well and smoothly as well as weak support from social, economic and political conditions for the implementation of public information openness policies in the City of Padang. However, the institutional variables are quite good, where there is an organizational structure that has a span of control that is not too long, making it easier to coordinate and implementer responses that support this policy.

**Keywords: Policy Implementation, Openness of Public Information, Padang City Government**